

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring semakin pesatnya perkembangan zaman menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip Good Governance atau tata pemerintahan yang baik umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Pelaksanaan *good governance* memiliki prinsip diantaranya, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme dan pertanggungjawaban (Indra Bastian 2007:75).

Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu Laporan Keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengolahan atau pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas.

Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan (Pirmatua Sirait, 2014:19). Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan sektor publik adalah suatu laporan yang merepresentasikan posisi keuangan dari

transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Indra Bastian, 2010:297).

Kualitas Lapoaran Keuangan adalah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukutan, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengellaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Erlina, Omar Sakti dan Rasdianto, 2015:25).

Indikator kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), andal (*reability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*). Apabila informasi yang ada pada laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah memenuhi kriteria kualitatif laporan keuangan pemerintah, maka laporan keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan berkualitas. Indikator laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Mahmudi, 2011:106).

Adapun fenomena terkait kualitas laporan keuangan yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2017 dilakukan secara bertahap kepada 27 kabupaten kota pada tahun anggaran (TA) 2017, hanya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Subang yang masih mendapat

opini wajar dengan pengecualian (WDP). Persoalan Kota Bandung yakni terdapat temuan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dimana terdapat kesalahan dalam pencatatan aset, ujar kepala BPK perwakilan Jawa Barat Arman Syifa (Arman Syifa, 2017).

Kualitas informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan pihak manajemen untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan sehubungan dengan operasi instansi serta untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas (Hall Singleton, 2007:30).

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan (Anastasia dan Lilis, 2011:4). Sistem Informasi Akuntansi merupakan sekelompok struktur dalam suatu entitas yang mengelola sumber daya fisik dan sumber daya lain untuk mengubah data ekonomi dan menjadi informasi akuntansi, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi berbagai pihak (Atyanto Mahatmyo, 2014:9). Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terintegrasi yang menghasilkan laporan di bentuk data transaksi bisnis yang diolah dan disajikan sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang memiliki arti bagi pihak yang membutuhkannya (Mardi, 2011:4).

Sistem Informasi Akuntansi pada dasarnya merupakan integrasi dari berbagai subsistem pengolahan transaksi atau sub sistem informasi akuntansi karena setiap sistem pengolahan transaksi memiliki siklus pengolahan transaksi sehingga sistem

informasi akuntansi juga dapat dikatakan sebagai integrasi dari berbagai siklus pengolahan transaksi maka setiap pengolahan transaksi yang dilakukannya oleh sistem pengolahan transaksi atau sub sistem informasi akuntansi memiliki berbagai komponen seperti *hardware, software, brainware, prosedur, database* dan jaringan komunikasi (Azhar Susanto, 2008:72).

Indikator sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan sistem informasi yang berkualitas yaitu kemanfaatan, ekonomis, daya andal, ketersediaan, ketepatan waktu servis pelanggan, kapasitas, praktis, fleksibilitas, daya telusur, daya audit, dan keamanan (Krismiaji, 2010:16). Menurut Delone & Mclean (2003:26) indikator sistem informasi yaitu adaptasi, ketersediaan, keandalan sistem, waktu respon, dan kegunaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Inta Budi Setya Nusa (2016) menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi proses bisnis suatu entitas. Lalu penelitian yang telah dilakukan oleh Rukmi Juwita (2013) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Fenomena terkait sistem informasi akuntansi yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan yang dihasilkan Pemprov belum optimal. Salah satu penyebabnya yaitu sistem informasi yang diterapkan Pemprov DKI sering kali terjadi kesalahan, antara lain sistem informasi mencatat aset yang sama pada dua SKPD yang berbeda, dan data dari sistem informasi yang mencatat aset terkadang terjadi *error* sehingga aset dicatat namun tanpa informasi yang lengkap, ujar anggota 5 BPK RI Isma Yatun (Isma Yatun, 2017).

Pengelolaan barang milik daerah menjadi kebutuhan dan isu yang penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas keuangan daerah (Bambang Pamungkas. 2014:179). Penilaian aset/ barang milik daerah yang baik yang baik dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah (Doli Siregar, 2004:50).

Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yakni perolehan dari hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Moermahadi Djanegara, 2017:63).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 barang/ aset milik daerah yaitu yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah, yang meliputi antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang; barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Indikator pengelolaan barang milik daerah yang baik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yaitu lingkup pengelolaan Barang Milik negara/daerah mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian;

pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dengan pengelolaan BMD yang efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya diharapkan dapat menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku terlebih pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yulpi Poae, Ventje Ilat dan Jessy D.L Warongan (2017) penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun fenomena terkait pengelolaan barang milik daerah yaitu hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kota Bandung pada tahun 2018, pemerintah kota Bandung masih memiliki permasalahan terkait pengelolaan aset. Masalah yang dihadapi yaitu kurangnya pengawasan atas perawatan aset sehingga terdapat aset yang rusak dan tidak terawat, ujar kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat, Yuniar Yaniar Rasyid (Yuniar Yaniar Rasyid, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengembangan model untuk menemukan produk atau memodifikasi produk sehingga lebih efektif dan efisien, maka dalam kegiatan

mengembangkan model akan terjadi kegiatan penelitian dan kegiatan pengembangan dimana untuk kegiatan itu harus dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan (Nusa Putra, 2013:97). Berdasarkan Latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapatnya permasalahan pada laporan keuangan pemerintah kota Bandung yang menyebabkan didapatnya opini Wajar Dengan Pengecualian.
- 2) Masih terdapatnya kelemahan dalam pengelolaan keuangan akibat dari tidak optimalnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi.
- 3) Masih terdapatnya masalah pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset/barang milik daerah.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bentuk pertanyaan yang dapat memandu peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan, ketika menyusun sebuah rumusan masalah harus memperhatikan teknik perumusan masalah sehingga dalam melaksanakan penelitiannya tidak mengalami kesalahan atau kegagalan (Sugiyono, 2015:228). Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data dan solusi permasalahan yang berhubungan dengan judul yang peneliti kaji yaitu pengaruh sistem informasi akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan dimana secara umum penelitian kuantitatif memiliki dua jenis tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*) (Nana, 2009:96). Sesuai dengan masalah yang ingin peneliti kaji, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan dari penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat (Sugiyono, 2017:283)

1.5.1 Kegunaan Praktis

Berdasarkan teori tersebut maka kegunaan praktis yang penulis ambil yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah (fenomena) yang diangkat dalam penelitian ini, baik bersifat umum ataupun khusus yang berlaku di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis merupakan kegunaan penelitian dari aspek teoritis yakni manfaat penelitian untuk pengembangan ilmu (Soekidjo, 2010:13). Oleh karena itu penelitian dasar penulis adalah sebagai berikut :

1) **Bagi Peneliti**

Peneliti menghasilkan hasil penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri.

2) **Bagi Pihak Lain**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.